PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA GUNA MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

DI KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT

*Selviana Sarwa*

 *NPP. 30.1560*

*Asdaf Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil* Email: sarwaselviana1995@gmail.com

# ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** *The Family Planning Program (KB) is one of the government's programs in an effort to reduce the rate of population growth in Indonesia. In family planning programs, community participation is very important to achieve this goal.* ***Objective*** *: to identify and analyze community participation in family planning programs in Tambrauw District, West Papua Province. The research* ***method:*** *used is a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The* ***results:*** *showed that community participation in family planning programs in Tambrauw District was low, especially in terms of counseling and providing information about family planning programs. there are still several inhibiting factors that reduce community participation such as a lack of PKB/PLKB personnel in n an effort to increase community participation in the family planning program in Tambrauw district, namely carrying out ball pick-up services and operational vehicles from the women's empowerment and child protection services.* ***Conclusion:****coordinating family planning outreach activities and socialization activities are also reduced and the facilities to support the mobility of family planning services have not been maximally facilitated.*

***Keywords : Community Participation, Family Planning Program, population growth rate***

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Program Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu program pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Dalam program KB, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini **tujuan** untuk mengidentifikasi dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam program KB di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat. **Metode**: penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil**: penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program KB di Kabupaten Tambrauw rendah terutama dalam hal penyuluhan dan pemberian informasi tentang program KB. masih ditemukan beberapa faktor penghambat yang mengurangi partisipasi masyarakat seperti kurangnya personil PKB/PLKB dalam mengkoordinir penyuluhan KB kegiatan sosialisasi juga berkurang serta sarana untuk menunjang mobilitas pelayanan kelurga berencana belum di fasilitasi secara maksimal. **Kesimpulan**: Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB di kabupaten tambrauw yakni Melakukan pelayanan jemput bola serta menyediakan kendaraan operasional dari dinas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat,Program Keluarga Berencana,laju pertumbuhan**

**penduduk**

1. **PENDAHULUAN**

# Latar Belakang

 Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu permasalahan mengenai laju pertumbuhan penduduk disuatu Negara yang harus diperhatikan secara serius karena bila terjadi laju pertumbuhan penduduk yang besar dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah lainnya yang akan menganggu proses pembangunan suatu Negara. Hal ini selaras dengan Kependudukan Indonesia yang berada pada poin utama prioritas pemerintah dalam merencanakan kebijakan pembangunan berkelanjutan

Di Indonesia masalah jumlah penduduk yang besar dan tidak merata merupakan masalah tersendiri,maka pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah program yang diharapkan mampu mengatasi atau menekan sejumlah permasalahan terkait laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang program tersebut bernama keluarga berencana (disingkat KB) merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat sejahtera. Guna menanggulangi lonjakan pertumbuhan penduduk. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem informasi keluarga.

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi,perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Program keluarga berencana (KB) ini dirancang sebagai usaha pemerintah untuk membangun manusia yang berkualitas, karena program keluarga berencana (KB) adalah suatu gerakan untuk membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran yang dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan menjalankan program KB masih rendah , hal ini di karenakan masyarakat yang lebih memilih untuk lebih mendengarkan kepala suku di bandingkan pemerintah. Sebagian masyarakat atau sekelompok masyarakat masih mempercayai bahwa KB itu tidak diperbolehkan, Karena bagi mereka mendapatkan banyak anak maka mendapat banyak juga rejeki. Partisipasi masyarakat untuk penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Tambrauw lebih dominan kepada wanita dan pengetahuan serta manfaat berubah bagi pria dengan pemikirannya bahwa jika wanita saja yang menggunakan alat kontrasepsi maka tidak akan terjadi kehamilan hal ini menyebabkan cakupan pelayanan KB pada pria sedikit dan kurangnya minat pria dalam penggunaan alat kontrasepsi.

Undang-Undang No 87 tahun 2014 Tentang Perkembangan Penduduk ,Pembangunan Keluarga,Keluarga Berencana,Dan System Informasi Keluarga pada pasal 1 ayat 11 norma Keluarga Kecil Bahagia Dan Sejahtera (NKKBS) adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai –nilai agama dan sosial budaya yang membudayakan dalam diri pribadi,keluarga ,dan masyarakat,yang berorintasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin sosialisasi Undang Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan reproduksi membuat paradigma pemahaman masyarakat tentang nilai anak bergeser

Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi menyebabkan banyak terjadi peristiwa kelahiran diluar nikah akibat dari pergaulan bebas dan masih rendahnya kemauan masyarkat terhadap pendewasaan usia perkawinan ,didorong oleh beberapa alasan seperti adat istiadat ,ekonomi dan sosial budaya ,serta masih rendahnya KB aktif.

 Tingkat Partisipasi masyarakat sangat penting bahkan menjadi salah satu tujuan dari program keluarga berencana itu sendiri, yaitu terlibatnya, tergeraknya seluruh masyarakat dalam suatu proses pelaksanaan program secara berencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

# Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa masalah berkaitan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana di kabupaten tambrauw provinsi papua barat yaitu memiliki tingkat partisipasi dalam program keluarga berencana (KB) yang rendah, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya dasar pengetahuan masyarakat akan pentingnya program keluarga berencana (KB), masyarakat juga masih terikat dengan adat istiadat karena apabila masyarakat tidak mengidahnkan adat istiadat tersebut maka anak menimbulkan malapeta dalam keluarga tersebut misalnya ada keluarga yang meninggal,kemudian banyak suami yang tidak mengijinkan istri ikut KB di karenan kepercayaan agamanya karna anak adalah anugerah dari Tuhan. Banyaknya mitos yaitu jika mengikuti KB maka tidak akan punya anak lagi.Hal ini yang menyebabkan kurangnya minat pasangan usia subur (PUS) menggunakan KB seperti halnya bahwa program keluarga berencana adalah haram untuk dilakukan. Hingga pola pikir masyarakat yang menyatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Dalam hal ini terlihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam program keluarga berencana sehingga menyebabkan angka kelahiran yang cukup tinggi di kabupaten tambrauw.

# Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks partisipasi. Penelitian Muhamad febriansa berjudul studi tentang partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana di kecamatan kota bangun kabupaten kutai kertanegara(2015) menemukan bahwa Berdasarkan studi observasi yang telah dijalankan diperoleh kesimpulan bahwa kurangnya keikutsertaan,

kemauan dan kemampuan masyarakat secara mandiri dalam norma keluarga kecil,bahagia dan sejaterah{NKKBS}. Kurangnya keterlibatan masyarakat terhadap sosialisasi undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur hak reproduksi dan kesehatan reproduksi Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.penelitian lIna nuraeni,M.Rijal Amirulloh,Dine Meigawati berjudul Strategi dinas penegendalian penduduk keluarga berencana

 Dalam kesadaran masyarakat mengenai program keluarga berencana di kota sukabumi (2021) dengan kesimpulan pada pasangan usia subur atau PUS dan juga kepada ibu yang baru melahirkan dan akseptor yang beralih cara metode kontrasepsinya yang dari NON MJKP ke MJKP . Dalam menggunakan alat kontrasepsi dapat memilih 2 cara yaitu NON MKJP(metode kontrasepsi jangka panjang)dan MKJP (metode kontasepsi jangka panjang)

dimana NON MKJP terdiri dari suntik,pil dan kondom,sedangkan MKJP terdiri dari IUD(intra uterine device),implant,MOW(metode operasi wanita),dan MOP(Metode operasi pria)

# Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan variable dan lokasi penelitian yang berbeda dan konteks penelitian ini berfokus pada pasrtisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana guna menekan laju pertumbuhan penduduk di kabupaten tambrauw yang memakai teori mubyanto(2008) dengan 2 indikator dalm teorinya .selain itu permasalahan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni kurangnya pemahaman terkait program KB,kesehatan ibu habis melahirkan,ekonomi, kemudian masih adaya kepercayaan terhadap adat istiadat yang masih mempengaruhi partisipasi masyrakat dalam program KB karena jika banyak anak akan terkena malapetaka pada keluarga yang mengikuti program KB

# Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam program KB guna menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tambrauw. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan program KB Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tambrauw. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tambrauw guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

# METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan sehingga peneliti dapat mendeskripsikan tentang fenomena-fenomena secara factual,selanjutnya setelah data diperoleh ,peneliti melakukan analisa terhadap data-data yang mendeskripsikan fenomena tersebut sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan.dengan metode kualitatif pendekatan induktif penulis dapat melakukan pengamatan dan memperoleh gambaran terhadap kejadian yang terjadi di lapangan terkait partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana guna menekan laju pertumbuhan penduduk dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori mubyanto dalam roesmidi (2008) yang manyakan bahwa patrisipasi dibedakan menjadi 2 yaitu partisipasi horizontal dan vertical.

Penulis menggunakan metode kualitatif dan induktif dalam penelitian ini untuk memahami, menjelaskan, dan mengidentifikasi bagaimana partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana guna menekan laju pertumbuhan di kabupaten tambrauw

# HASIL DAN PEMBAHASAN

* 1. **Partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana**

Partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana guna menekan laju pertumbuhan penduduk pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka peneliti akan membahas beberapa faktor yang menjadi penghambat serta upaya apa saja yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program keluraga berencana guna menekan laju pertumbuhan penduduk.

Sehingga secara umum, dapat dikatakan ahwa semakin cepat laju pertumbuhan penduduk.

Menurut mubyanto dalam roesmidi (2008)partispasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu partisipasi horizontal dan vertical

* + 1. **Partisipasi horizontal**

Partisipasi horizontal dilakukan oleh sesama warga antar sesama warga atau anggota perkumpulan .Disebut partisipasi horizontal karena suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa,dimana setiap anggota masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lain,baik dalam melakukan usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.Tentu saja partisipasi seperti ini merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.partisipasi horizontal terbagi menjadi 5 indikator

1. **Jumlah keluarga yang berpartisipasi**

Masyarakat dapat meningkatkan kesehatan keluarga karena memberikan waktu yang cukup untuk mengembalikan kesehatannya setelah melahirkan dan mengurus anak.Keluarga secara teratur rutin periksa ke dokter atau bidan untuk mengetahui kondisi program KB yang diikuti sekaligus mengontrol kondisi kandungan, baik itu dalam menggunakan alat-alat kontrasepsi maupun kegiatan program KB lainnya, menggunakan alat kontrasepsi yaitu datang secara langsung dan menggunakan alat kontrasepsi di klinik-klinik ataupun puskesmas. Setelah melahirkan anak pertama dan setelah melangsungkan pernikahan sebagai cara untuk menunda kelahiran atau pun menjarangkan jarak kelahiran anak. Masyarakat sangat dibutuhkan untuk menekan angka kelahiran dan mengatur jarak kelahiran. Sebagian besar masyarakat mempertanyakan tentang fungsi alat-alat keluarga berencana.

1. **Tingkat keaktifan partisipasi keluarga**

Keaktifan yang dimaksud adalah tingkat kegiatan partisipasi keluarga atau kesibukan ,dengan demikian kader program keluarga berencana yang aktif adalah kader yang giat, rajin dalam berusaha atau bekerja adapun keaktifan masyarakat dalam program keluarga berencana merupakan kegiatan atau kesibukan kader di kelompok UPT. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, kader kesehatan merupakan perwujudan peran serta aktif masyarakat dalam pelayanan terpadu yang disebut juga sebagai promotor kesehatan desa yang dipilih oleh masyarakat setempat secara sukarela dalam pengembangan kesehatan keluraga. Keluarga yang aktif dalam menjalankan Program Keluarga Berencana ada, tetapi kurang pada pengetahuan kader tentang program Keluarga Berencana, mengakibatkan kader tidak dapat menentukan sikap kepada para sasaran program karena kader takut apabila terjadi suatu akibat negatif,Jika seseorang melakukan MOP Sehingga dapat dikatakan bahwa kader tidak bisa mengarahkan keluarga karena kurangnya pengetahuan. Partisipasi keluarga pun masih tergolong rendah. Keluarga sangat aktif dalam mengunakan alat kontrasepsi seperti IUD, implan, pil, KB suntik dan alat-alat kontrasepsi lainnya. Adanya program KB untuk menekan angka kelahiran anak dan penjarakan jarak kelahiran anak, dan itu adalah tujuan dari program keluarga berencana. Rendahnya peran serta pria dalam ber-KBH,hingga saat ini pun belum ada forum yang mempertemukan antara petugas (PLKB) maupun kader dengan para pria sebagai sasaran dari program KB Pria. Selain itu, kemitraan antara pemerintah dengan organisasi lokal belum nampak. Organisasi lokal seperti RT, RW kurang berperan dalam membantu mensosialisasikan program KB

1. **Ketertiban masyarakt dalam mengambil keputusan**

Indikator ini mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat terlibat dalam kegiatan program keluarga berencana misalnya melalui musyawarah desa dan forum-forum diskusi. Peran suami dalam hal kontrasepsi jarang sekali yang menjadi akseptor, walaupun demikian beberapa suami tetap ikut andil dalam masalah KB, misalkan dengan memberikan saran dan ikut memutuskan dalam pemilihan kontrasepsi yang akan dipakai dan mengantarkan istri untuk pergi ke pelayanan kesehatan. Untuk menentukan pilihan metode kontrasepsi ,sebagian besar menggunakan musyawarah antara suami dan istri. Keputusan penggunaan kontrasepsi memang menjadi keputusan seorang suami, terkait kesehatan reproduksi pasangan dan memiliki anak atau tidak adalah tanggung jawab bersama pasangan.

1. **Tingkat keberlanjutan program**

Indikator ini mengukur sejauh mana program kelurga berencana terus berjalan secara berkelanjutan ,termasuk melalui dukungan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana.Keberlanjutan program keluarga berencana di kabupaten tambaruw masih terus berjalan dengan adanya pasangan usia subur yang mulai sadar tentang pentingnya program kelurga berencana demi kesehatan ibu melahirkan,ekomoni . Hal tersebut karena lokasi kampung dekat dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan, responden puas dengan pelayanan KB, pengurus dan petugas penyuluhan yang aktif.

1. **Tingkat partisipasi aktif masyarakat**

Pada tingkatan manupulasi ini pemerintah membuat program pembangunan kemudian membentuk komite (Badan Penasehat) untuk mendukung pemerintah. Dengan dibentuknya komite tersebut, pemerintah memanipulasi masyarakat sehingga munculnya anggapan bahwa program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya dijadikan kendaraan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan tidak adanya peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai dukungan masyarakat dengan ukuran kemauan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uang maupun tenaga. Yang mempengaruhi masyarakat agar memiliki minat dan keaktifan masyarakat dalam program Keluarga Berencana Masyarakat sangat dibutuhkan. Minat dan keaktifan masyarakat sangat mempengaruhi program KB kabupaten tambrauw yaitu dari ibu sendiri, suami atau keluarga. Setiap saat minat/keaktifan masyarakat itu diperlukan, karena kesuksesan program KB sangat bergantung pada pastisipasi masyarakat. Agar masyarakat menekan angka kelahiran dan penjarakan jarak kelahiran anak.

* + 1. **Partisipasi vertical**

Partisipasi *vertikal* adalah suatu kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalammnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan. Untuk mengetahui patrisipasi *vertikal* dari pelaksaan program KB peneliti memberikan 4 sub indikator yang di kembangkan oleh peneliti.

1. **Tingkat partisipasi dari kabupaten tambrauw**

Salah satu upaya yang ingin dicapai oleh setiap pemerintah daerah dalam mengelolah pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya dimana dengan adanya peningkatan kinerja maka akan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.Pemerintah kabupaten tambrauw dalam surat edaran gubernur provinsi papua barat No.471/230/GPB /2021 sebagai bentuk tidaklanjut Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ,surat edaran kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional(BKKBN) Nomor 28/LP.01/GA/2020 tanggal 16 oktober 2020 tentang pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021. Surat gubernur papua barat ini kemudian di tindaklanjuti oleh bupati kabupaten tambrauw ,melalui surat edaran No 474/82/2021 dengan mendandaskan beberapa hal penting,di antaranya diharapkan kepada seluruh kepala distrik,kepala kampung agar mendukung pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 .kemudian ,mendukung dan membantu para kader pendataan saat melakukan pendataan keluarga pasangan usia subur. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa pemeritah kabupaten tambrauw provinsi papua barat sangat berpartisipasi memperhatikan masyarakatnya hal ini di buktikan dari bupati dan wakil bupati yang menindaklanjuti surat edaran dari gubernur papua barat dan kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional untuk pelaksaan pendaatan keluarga .

1. **Keberhasilan program KB dalam mencapai target yang di tetapkan oleh pemerintah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun**  | **Jumlah PUS** | **Kesertaan Ber-KB** |  |
| **PUS Peserta KB** | **PUS Bukan Peserta KB** |
| **Jumlah** | **%** | **Jumlah** | **%** |
| **2020** | **1.558** | **456** | **29.26** | **1876** | **20.41** |
| **2021** | **2.848** | **526** | **18.47** | **2.305** | **80,93** |

Berdasarkan tabel tersebut belum ada pencapaian target dalam penggunaan program KB hal di karenakan dengan jumlah pasangan usia subur yang cukup banyak pada kabaputen tambrauw pada tahun 2020 berjumlah 1.558 namun yang berpartisipasi dalam program KB yaitu 456 pasangan usia subur dan pasangan usia subur pada tahun 2021 berjumlah 2.848 dengan jumlah pasangan usia subur yang mengikuti program KB yaitu 526 sehingga pemerintah kabupaten hanya menjalankan saja program keluarga berencana pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1. **Tingkat dukungan partisipasi dari para pemangku kepentingan seperti kepela adat dalam program KB**

Kepala suku di kabupaten tambrauw mengapresiasi dan ikut mengambil bagian dalam mengijinkan agar dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat mensosialisasikan program yang telah ditetapkan pemerintah dan apa yang telah di lakukan pemerintah dalam hal Partisipasi masyarakat pada kabupaten tambrauw, namun tidak sepenuhnya mengacu pada undang undang yang berlaku terkait keluarga berencana. Masyarakat yang berada pada kabupaten tambrauw masih terikat dengan adanya hukum adat yang berlaku dan masih banyak masyarakat mendengar apa yang di katakan kepala suku .hal ini dikerenakan jumlah pasangan usia subur sangat banyak namun hanya beberapa orang yang mengikuti program KB.

1. **Tingkat kesadaran masyarakat dan kesadaran dalam penggunaan kontrasepsi dalam program KB**

Pelaksaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberian informasi,melalui punyuluhan memegang peranan penting untuk dalam mendukung usaha untuk menigkatkan angka cakupan KB yang rendah .Penyuluhan yang dilakukan secara terus menurus disertai dengan cara penyuluhan menarik lama kelamaan akan meningkatkan rasa ingin tau dan lebih jauh lagi menjadi kebutuhan.Bila penyuluhan sudah menjadi kebutuhan sesorang maka akan jauh lebih mudah untuk melakukan sosialisasi berbagai program kesehatan .sejalan dengan perlunya informasi tentang kontrasepsi bagi wanita usia subur maka penyuluhan tentang program KB perlu di tingkatkan lagi sehingga akspektor KB dapat meningkatkan pengetahuannya dan mengatur jarak kelahiran,pengetahuan wanita usia subur atau pasangan usia subur dan kesadaran untuk menggunakan alat kontrasepsi yang aman ,sehingga capaian penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang.

* 1. **Faktor penghambat pelaksanaan program keluarga berencana**

Penulis melakukan wawancara dengan informan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana .Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan penulis mengetahui dan menemukan faktor penghambat dalam pelayanan tersebut yaitu kurangnya personil PKB/PLKB dalammengkoordinir penyuluhan KB,kualitas sosialisasi berkurang,sarana untuk menunjang mobilitas pelayanan KB belum difasilitasi secara maksimal

* 1. **Upaya Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana.**

Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan penulis mengetahui dan menemukan upaya yang di lakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain melakukan pelayanan jemput bola dan penyediaan operasional dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

* 1. **Diskusi temuan utama penelitian**

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan dan mematuhi serta ikut serta mengambil bagian dalam suatu organisasi atau kegiatan tertentu.pengaturan ini di buat untuk mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk dikabupaten tambrauw yang semakin meniggkat sehingga saya khwatir potensi akan menjadi masalah dimasa depan jika tidak ditanamkan dari sekarang untuk pola piker masyarakat yang masih terikat dengan adat istiadat yang berlaku.

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang di uraikan pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tambrauw belum cukup efektif dalam menyelenggarakan program keluarga berencana.Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta KB baru dan peserta KB aktif dan juga lebih tingginya jumlah pasangan usia subur yang tidak ber-KB sehingga mengalami sedikit peningkatan, Permasalahan yang menghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tambrauw dalam penyelenggaraan program KB adalah kurangnya personil PKB/PLKB dalam mengkoordinir penyuluhan KB. Selain itu kegiatan sosialisasi juga berkurang serta sarana untuk menunjang mobilitas pelayanan keluarga berencana belum di fasilitasi secara maksimal Upaya yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,melakukan pelayanan jemput bola dan berkoordinasi terkait penyediaan kendaraan operasional dari dinas.

**Keterbatan penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kabupaten dengan waktu hanya 2 minggu

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencn guns menekan laju pertumbuhan penduduk di kabupaten tambrauw

# UCAPAN TERIMA KASIH

# ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada orang tua saya ( mama emma dan bapak alm yulius) yang paling berjasa dalam penulisan ini,selanjutnya kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten tambrauw provinsi papua barat beserta jajaran yang memberikan kesempatan penulis untuk untuk melaksanakan penelitian,serta seluruh pihak yang membantudalam mensukseskan pelaksaaan penelitian

# DAFTAR PUSTAKA

Febriansyah, M. (2015). *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.* *EJournal Administrasi Negara*, *3*, 873–884.

Nuraeni, I., Amirulloh, M. R., & Meigawati, D. (2021). *Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dalam Kesadaran Masyarakat Mengenai Program Keluarga Berencana Di Kota Sukabumi*. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*,*5*(2),277.https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.277-285

*Roesmidi, & Risyanti, R. (2008). pemberdayaan masyarakat (kedua). Bibliografii hlm.*

*surat edaran gubernur provinsi papua barat No.471/230/GPB /2021*

*Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ,surat edaran kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional(BKKB*